

## **NILAI-NILAI PANCASILA DALAM ORIENTASI DAKWAH DI INDONESIA**

**Abdul Aziz Harahap**<sup>a</sup>

**Muhammad Ali Yunus**<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Instittut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah Nusa Tenggara Barat

abdaziz@iain-padangsidimpuan.ac.id

aliyyhue@gmail.com

### **Abstrak**

Di tengah problem banyaknya figur pendakwah yang memiliki paradigma dan sikap keberagaman sosial yang eksklusif, intoleran, bahkan radikal, pada tahun 2017 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pedoman dakwah. Pedoman tersebut dimaksudkan agar menjadi kode etik dalam menjalankan aktifitas dakwah di Indonesia. Penelitian kualitatif berupa studi pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi dakwah yang dirumuskan MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi dakwah di Indonesia yang dirumuskan oleh MUI. Kesimpulan besa demikian dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut. Pertama, nilai sila pertama dan kedua dalam orientasi mewujudkan kehidupan umat Islam yang menjunjung nilai-nilai transendental dan kemanusiaan. Kedua, nilai sila ketiga dalam orientasi mewujudkan kehidupan umat Islam yang cinta tanah air dan toleran. Ketiga, nilai sila keempat dan kelima dalam orientasi mewujudkan kehidupan umat Islam yang inovatif dan harmonis. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan ajaran dakwah Islam memiliki titik temu dengan pelbagai nilai universal yang dapat menjadi pedoman hidup dalam kehidupan masyarakat yang heterogen, yakni tidak sebatas eksklusif untuk kemaslahatan hidup umat Islam.

**Kata Kunci** : Nilai, pancasila, orientasi dakwah, Indonesia

## Abstract

In the midst of the problem of many preaching figures who have an exclusive, intolerant, and even radical paradigm and social religious attitude, in 2017 the Indonesian Ulema Council (MUI) has issued a da'wah guideline. The guidelines are intended to be a code of ethics in carrying out da'wah activities in Indonesia. This qualitative research in the form of a literature study aims to identify the dimensions of the values of Pancasila in the da'wah orientation formulated by the MUI. This research uses a normative-philosophical approach. The results of the study conclude that there are dimensions of Pancasila values in the orientation of da'wah in Indonesia which were formulated by the MUI. there are dimensions of Pancasila values in the orientation of da'wah in the da'wah guidelines formulated by the Indonesian Ulema Council (MUI). Such a big conclusion can be seen in the following description. First, the values of the first and second precepts in the orientation of realizing the life of Muslims who uphold transcendental and human values. Second, the value of the third precept is in the orientation of realizing the life of Muslims who love their homeland and are tolerant. Third, the value of the fourth and fifth precepts in the orientation of realizing an innovative and harmonious Muslim life. The theoretical implication of this research shows that the teachings of Islamic da'wah have a meeting point with various universal values that can be a way of life in the life of a heterogeneous society, which is not limited to being exclusively for the benefit of the lives of Muslims.

**Keywords:** Values, pancasila, da'wah orientation, Indonesia

## Pendahuluan

Realitas perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih telah memberi banyak kemudahan bagi kehidupan manusia modern. Sebagai contoh berkembangnya aplikasi media sosial berbasis *online* (internet) telah banyak memberi kemudahan para pendakwah (da'i) dalam menjalankan aktifitasnya di era digital saat ini (Ahmed Shan A Alahi & M. Nazmul Huda, 2016.hlm. 1). Namun demikian, keberadaan media sosial terkadang juga dijadikan oleh mereka untuk tidak sekedar menyiarkan syiar ajaran Islam, akan tetapi juga untuk menyampaikan misi sosial-politik dalam isi (konten) materi dakwahnya. Hal demikianlah yang kemudian tidak mengherankan jika konten dakwah yang bertebaran di media sosial seringkali memiliki ragam corak ideologis yang beragam, bahkan tidak sedikit terjadi perselisihan paham bahkan konflik ideologis di antara para da'i yang disampaikan dalam masing-masing konten dakwahnya(L.Rudy Rustandi, 2020, hlm. 26). Oleh sebab itulah, tidak berlebihan jika dikatakan eksistensi media sosial bagi aktifitas dakwah di era digital saat ini tidak senantiasa berdampak positif, melainkan juga menyisahkan problem dan tantangan baru bagi dunia aktifitas dakwah (Mastori & Athoillah Islamy, 2021, hlm. 2).

Selain problem corak ideologi dakwah sebagaimana di atas, setidaknya terdapat dua faktor yang seringkali melahirkan problem aktifitas dakwah di ruang media sosial. Pertama, materi dakwah yang tidak konsisten dan terintervensi oleh pelbagai motif di luar dakwah. Kedua, figur da'i tidak memiliki kompetensi ilmu ke-Islaman yang baik. Tidak sedikit ditemukan dari mereka memiliki paradigma dan sikap keberagamaan sosial yang eksklusif, intoleran, bahkan radikal. Hal demikian berdampak pada materi dakwah yang berpotensi memicu ragam konflik sosial di tengah masyarakat (Erwin Jusuf Thaib, 2019, hlm. 38).

Fenomena problem dakwah di atas kontra-produktif dengan semangat nilai-nilai ajaran Islam yang universal. Nurcholish Madjid (Cak Nur) menyatakan bahwa Islam merupakan ajaran universal yang menebar kasih sayang kepada seluruh kehidupan alam semesta (Athoillah Islamy, 2021, hlm. 114). Pernyataan demikian paralel dengan pandangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyatakan universalisme Islam bukan terletak pada aspek detailnya ajaran, melainkan pada prinsip ajaran yang menekankan nilai keadilan, kemashlahatan, dan keluwesannya dalam merespon dinamika perkembangan zaman dan problematikanya (Athoillah Islamy, 2021, hlm.61). Dengan demikian seharusnya orientasi materi dakwah Islam di Indonesia dapat menunjukan wajah ajaran Islam yang

universal dalam menebarkan kasih sayang bagi kehidupan yang majemuk, bukan justru menunjukkan wajah Islam yang eksklusif, intoleran apalagi radikal.

Merespon polemik dakwah di Indonesia, pada tahun 2017 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pedoman dakwah bagi para pendakwah di Indonesia. Pedoman tersebut dimaksudkan agar dapat menjadi kode etik para da'i dalam menjalankan aktifitas dakwahnya, baik di ruang media *online* maupun *offline*. Pedoman dakwah tersebut juga dimaksudkan agar dapat menjadi rambu-rambu atas pelbagai bentuk motif ideologis dalam konten dakwah yang disampaikan kepada masyarakat (Komisi Dakwah MUI, 2017, hlm. 2-8)

Terlepas dari pedoman dakwah yang dirumuskan oleh MUI, penting kesadaran seluruh elemen masyarakat cerdas dan selektif agar memilih konten dakwah yang menunjukkan ajaran Islam yang moderat dan menebar kasih sayang kepada kehidupan alam semesta. Terlebih dalam konteks Indonesia, penting memahami orientasi materi dakwah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang menjadi pedoman dasar (ideologi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, seperti halnya pelbagai nilai luhur dalam Pancasila yang menjadi ideologi negara (Jagad Aditya Dewantara dkk, 2019, hlm. 400).

Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi dakwah di Indonesia yang termaktub pada dokumen naskah Pedoman Dakwah MUI. Penelitian ini penting dilakukan dengan harapan agar dapat menemukan adanya objektifikasi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi dakwah yang dirumuskan oleh MUI. Mengingat pada ranah praksisnya, masih banyak ditemukan fenomena dakwah yang justru kontra-produktif dengan semangat ajaran ke-Islaman dan semangat ke-Indonesiaan (Wahyudi Akmaliah, 2020, hlm. 1-2)

Berbagai penelitian ilmiah terkait berbagai fatwa sosial keagamaan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah banyak sekali dilakukan dengan ragam fokus dan perspektif. Namun berbeda jauh dengan penelitian yang mengkaji pedoman dakwah yang dirumuskan oleh MUI. Meski demikian berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan objek inti pembahasan penelitian ini, antara lain. Penelitian Adam Faroqi dan Nanang Ismail (2013) menyatakan bahwa peran dakwah MUI dalam menyampaikan syiar Islam kepada umat secara berkelanjutan dan dilakukan kapan saja ditopang oleh pengelolaan organisasi dengan dukungan perkembangan teknologi. Sebagai contoh keberadaan aplikasi Portal MUI *Online* yang membantu Syiar Islam

dan optimalisasi pengelolaan organisasi MUI di Kecamatan Ujungberung (Adam Faroqi & Nanang Ismail, 2013, hlm. 99). Penelitian tersebut fokus dampak Portal MUI *Online* pada perkembangan Syiar Islam dan manajemen organisasi MUI.

Kemudian Penelitian Asri Wahyuningrum, Anasom, dan Thohir Yuli Kusmanto (2015) menjelaskan terdapat dua strategi dakwah yang digunakan LPPOM MUI dalam program Gerakan Masyarakat Sadar Halal “Gemar HALAL”, yaitu strategi pensertifikasian dan strategi sosialisasi dan promosi. Penelitian ini fokus pada upaya untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam program sertifikasi halal sebagai strategi dakwah MUI Jawa Tengah. Dalam praktiknya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukung tersebut adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, terbina kerjasama yang baik secara internal dan eksternal, adanya partisipasi umat dan anggota yang berkompeten dalam setiap program. Sementara faktor penghambat adalah rangkap jabatan anggota dalam lembaga, ketersediaan dana yang minim, ketidakdisiplinan anggota dalam bekerja dan tidak bertanggung jawab pada pekerjaan yang ditugaskan (Asri Wahyuningrum, Anasom, Thohir Yuli Kusmanto, 2015, hlm.186) Penelitian tersebut fokus pada upaya untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam program sertifikasi halal sebagai strategi dakwah MUI Jawa Tengah.

Berikutnya, penelitian Abdurrahman Hilabi (2020) menuturkan dalam konteks perubahan iklim di Indonesia, bahwa berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh MUI dengan berbagai pihak termasuk pemerintah telah melahirkan enam fatwa yang menyangkut lingkungan hidup dan sumber daya alam. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk memberikan landasan bagi masyarakat Indonesia dan dunia secara syariah. Selain itu, fatwaini juga sebagai salah satu kampanye Muslim terhadap dunia, bahwa masyarakat Muslim Indonesia dan Dunia merupakan bagian dari komunitas dunia yang berpartisipasi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan perubahan iklim dunia (Abd Hilabi, 2020, hlm. 53). Penelitian tersebut fokus pada bagaimana langkah MUI melalui otoritas fatwanya untuk merespons dinamika perubahan iklim dan lingkungan hidup.

Berbeda dengan berbagai penelitian yang sudah ada sebagaimana di atas, penelitian ini fokus pada upaya identifikasi dimensi nilai-nilai Pancasila pada orientasi penyelenggaraan dakwah di Indonesia yang termaktub dalam pedoman dakwah MUI. Fokus demikianlah yang menjadi distingsi sekaligus *novelty* (kebaruan) penelitian ini dari beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam kategori jenis penelitian kualitatif yang berupa studi pustaka (*library research*). Data primer yang menjadi objek fokus inti penelitian berupa dokumen pedoman dakwah tahun 2017 yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara itu, data sekunder berupa berbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan objek inti penelitian, baik buku maupun jurnal ilmiah. Jenis penelitian normatif-filosofis ini menggunakan teori yang teori analisis berupa nilai-nilai falsafah yang termuat dalam Pancasila. Berbagai nilai falsafah tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi dakwah yang dirumuskan oleh MUI. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik.

## Hasil dan Pembahasan

### Pancasila : Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia

Jika dilacak secara historis, lahirnya negara bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pengumpulan perjuangan, pengrobanan, penderitaan dan juga berbagai cita kepribadian negara yang didambakannya oleh rakyat Indonesia (Athoillah Islamy, 2021, hlm. 199). Disepakatinya Indonesia sebagai negara bangsa meniscayakan asas yang dapat dijadikan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas yang dimaksud, yakni pelbagai nilai atau prinsip yang dapat menjadi titik temu (*kalimat al-sawa*) seluruh komponen bangsa. Mengingat karakter pluralitas bangsa Indonesia inilah yang kemudian menjadi pandangan hidup dan dasar negara dalam bentuk Pancasila. Dengan kata lain, keberadaan Pancasila merupakan manifestasi jiwa, filsafat, pandangan hidup dan juga nilai pendidikan karakter bangsa Indonesia (MK. Ridwan, 2017, hlm. 209)

Kendati Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar sekaligus ideologi bangsa Indonesia, akan tetapi dalam ranah praksisnya, respons masyarakat Indonesia tidaklah senantiasa searah dalam menerimanya. Hal demikian sejatinya juga dapat kita lihat dari awal kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan negara Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-undang Dasar bagi negara Republik Indonesia. Dengan menetapkan UUD 1945 itu, maka Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 secara resmi menjadi Dasar Negara Republik

Indonesia Dengan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, ternyata tidak secara otomatis Pancasila dapat dilaksanakan secara benar dan konsekuen. Di beberapa tempat terjadi berbagai macam pemberontakan dan penyelewengan terhadap Pancasila tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan hidup lain yang secara bebas hidup dan berkembang di negara Indonesia. Pandangan hidup lain itu berkembang menjadi sikap yang sangat mengutamakan kepentingan golongan atau daerah di atas kepentingan nasional. Peristiwa G.30 S/PKI Lubang Buaya pada tahun 1965, misalnya merupakan salah satu bukti pemberontakan yang ingin menyelewengkan Pancasila dan mengganti dengan ideologi lain yaitu paham komunis. Sebab utama terjadinya penyelewengan ialah karena Pancasila yang merupakan Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bernegara.

Memperhatikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang mengikat seluruh warga negara dan memperhatikan peristiwa historis terjadinya pemberontakan dan penyelewengan terhadap Pancasila, maka ada kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia untuk memahami, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Salah satu upaya untuk itu semua Pancasila harus disebarluaskan melalui Pendidikan Pancasila itu sendiri. Hal demikian disebabkan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila-pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila ini, negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultur yang amat penting. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya (M. Syamsudin, 2009, hlm. 3-4).

Sebelum jauh memahami nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan masyarakat Indonesia, (Syamsudin, 2019, hlm 68) penting dipahami kita pahami apa arti istilah Pancasila. Secara etimologis term “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta (bahasa kasta Brahmana). Pancasila terdiri dari dua kata, yakni kata Panca berarti lima, dan kata Sila berarti dasar. Dari unsur etimologis ini, dapat dikatakan bahwa kata Pancasila memuat arti lima dasar. Maksudnya, yakni lima Dasar Negara Republik Indonesia (Alwi Kaderi, 2015, hlm. 8). Namun penting diketahui bahwa Pancasila harus dinilai sebagai satu kesatuan utuh, dikarenakan masing-masing sila dalam konstruksi ide Pancasila saling sinergis dalam mewujudkan cita-cita yang diusungnya (Irwan Gesmi & Yun Hendri, 2018, hlm. 6).

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, hendaknya mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup sekaligus pembentukan nilai pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia. (Aulia Nur Jannah & Dinie Anggraeni Dewi, 2021, hlm. 931). Pada konteks inilah, pentingnya penghayatan pelbagai nilai yang termuat dalam Pancasila agar dapat dimanifestasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pada sub bab pembahasan inilah, akan diuraikan tentang apa saja nilai-nilai Pancasila yang dapat menjadi basis paradigmatis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai berikut,

**Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*.** Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia selalu mengedepankan Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai agama di Indonesia yang meliputi Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari berbagai agama tersebut, diwajibkan untuk saling menghormati antar seluruh agama seperti yang disebutkan pada UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan 29 ayat (2). Kedua pasal tersebut, menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk memilih dan menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing (Amalia Rizki Wandani & Dinie Anggraeni Dewi, 2021, hlm. 36). Keberadaan sila pertama ini juga mengisyaratkan agar manusia melaksanakan berbagai kewajiban dan menjauhi larangan dari ajaran agamanya. Namun penting diketahui, dalam konteks keyakinan beragama ini, masyarakat memiliki otoritas hak untuk mengikuti dan menjalankan kewajiban suatu agama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Nurva Milianoa & Dinie Anggraeni Dewi, 2021, hlm. 4). Pentingnya sikap toleransi beragama yang termuat dalam sila pertama ini menunjukkan pentingnya mengedepankan paradigma dan sikap dalam mewujudkan kehidupan keberagamaan sosial yang harmonis, baik dalam konteks relasi sosial antar seagama maupun berbeda agama di Indonesia.

Sila Kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Sila ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keadilan yang sama, yakni mampu melindungi keragaman serta mengakui persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan satu sama lain di Indonesia (Amalia Rizki Wandani & Dinie Anggraeni Dewi, 2021, hlm. 36). Tidak hanya itu, sila kedua ini juga memuat nilai pesan yang menyadarkan manusia kembali ke kodratnya yakni memiliki kesetaraan derajat di mata Tuhan. Hal demikian dimanifestasikan dengan sikap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara beradab (Nurva Milianoa & Dinie Anggraeni Dewi, 2021, hlm. 4). Muatan falsafah nilai kemanusiaan dalam sila kedua tersebut dapat menjadi dasar paradigma dan sikap bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan keberagamaan sosialnya, bahwa di sisi nilai

keagamaan terdapat juga nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menunjukkan adanya nilai persatuan bagi bangsa Indonesia. Pada sila ini dijelaskan tentang pentingnya mengedepankan kepentingan bersama demi persatuan bangsa dan Negara (Amalia Rizki Wandani & Dinie Anggraeni Dewi, 2021, hlm. 36). Nilai inilah meniscayakan pentingnya kesadaran masyarakat Indonesia agar saling bersatu, sebab dengan adanya sikap persatuan, maka tidak akan dapat terpecah belah. Terlebih dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang majemuk, maka keberadaan sikap persatuan menjadi hal yang tidak dapat terabaikan demi terwujudnya persatuan bangsa dan negara Indonesia (Nurva Milianoa & Dinie Anggraeni Dewi, 2021, hlm.4). Nilai persatuan dalam sila pertama ini sangat kompatibel dijadikan sebagai basis paradigmatik dan sikap sosial masyarakat Indonesia. Melalui kesadaran akan pentingnya komitmen persatuan dalam menjaga nilai persatuan Indonesia, maka dapat mengantar pola pikir maupun sikap sosial keberagamaan yang tidak mudah terpolusi oleh doktrin-doktrin agama yang justru kontra-produktif dengan komitmen nasionalisme.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Sila ini menunjukkan semua keputusan hendaknya selalu dilakukan dengan cara bermusyawarah (Amalia Rizki Wandani, Dinie Anggraeni Dewi, 2021, hlm. 36). Sila keempat ini juga mengandung pesan yang mengharuskan masyarakat Indonesia dapat senantiasa bersikap demokrasi (musyawarah) dalam mengambil keputusan terbaik ketika menghadapi persoalan bersama. Selain itu, juga dapat mendudukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang egaliter demi kepentingan bangsa Indonesia (Nurva Milianoa & Dinie Anggraeni Dewi, 2021, hlm. 4). Nilai kebijaksanaan dan permusyawaratan dalam sila keempat tersebut dapat dijadikan sebaga paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan atau pemikiran keagamaan oleh pihak atau organisasi (lembaga) keagamaan yang memiliki otoritas atau kapabilitas dalam memutuskan persoalan keagamaan terkait kemaslahatan bersama, selama tidak merugikan atau melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam ajaran agama tersebut.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memuat pesan adanya jaminan akses atas kemakmuran yang merata sesuai porsinya bagi seluruh kehidupan rakyat dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama (Nurva Milianoa & Dinie

Anggraeni Dewi, 2021, hlm. 4). Nilai keadilan sosial dalam sila kelima tersebut dapat menjadi basis paradigma dan sikap sosial keberagaman yang mau menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki oleh setiap umat beragama di Indonesia dalam mengekspresikan wujud keberagamaannya. Terlebih keberadaan Pancasila pada saat terbentuknya sejatinya menjadi jalan keluar, sebagai alat pemersatu dan simbol perdamaian di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki beragam agama (keyakinan), suku, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya (Akmal Rizki Gunawan Hsb, 2021, hlm. 184-185). Mengingat fakta sosiol-antropologis yang ada menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural (Akmal Rizki Gunawan Hsb & Siti Asiah, 2018, hlm. 93). Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika keberadaan Pancasila menjadi landasan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang latar belakang sosial budayanya sangat plural (Sudjito, dkk, 2018, hlm. 69)

Dalam penelitian ini, pendekatan nilai-nilai Pancasila sebagaimana telah diuraikan di atas akan digunakan sebagai kerangka teoritik dalam mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Pancasila dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi dakwah yang dirumuskan oleh MUI.

#### **Dimensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Tiga Orientasi Dakwah di Indonesia**

Penting disadari kembali dakwah merupakan aktifitas menyampaikan pesan-pesan atau nilai ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan menebar kedamaian hidup, bukan memicu keonaran, keresahan, kerusakan, apalagi intimidasi (Budi Kisworo, 2017, hlm. 105). Merspons hal tersebut, penting kesadaran para pendakwah untuk meluruskan tujuan utama dalam menyiarkan ajaran Islam agar tidak terpolusi oleh berbagai motif yang dapat merusak orientasi utama dalam aktifitas dakwahnya, terlebih aktifitas dakwah di media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat awam (Arifuddin, 2020, hlm. 161). Atas dasar inilah, aktifitas dakwah harus memiliki orientasi sekaligus cara yang tidak kontra-produktif dengan spirit nilai ajaran Islam yang menebarkan kasih sayang dan kedamaian hidup.

Selain pentingnya menjunjung tinggi nilai ajaran Islam yang menebar kedamaian dan kasih sayang kepada kehidupan alam semesta, dalam konteks Indonesia, aktifitas dakwah juga penting menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang menjadi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yakni sebagaimana nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila. Mengingat bangsa Indonesia sudah dapat menerima Pancasila schgai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila harus menjadi paradigma pengembangan kehidupan beragama. Dengan paradigma Pancasila, kiranya cukup jelas langkah-langkah dan

strategi apa yang harus dilakukan guna membangun kehidupan beragama yang paling menguntungkan bagi seluruh masyarakat (M. Syamsudin dkk, 2009, hlm.84)

Pada konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2017 telah merumuskan pedoman dakwah di Indonesia. Dalam pedoman dakwah tersebut dinyatakan penting bagi para pendakwah (da'i) untuk menyampaikan dakwah Islam yang berwawasan *wasathiyah* (moderat), bukan dakwah yang eksklusif, intoleran, profokatif, apalagi mengarah kepada hal-hal radikalisme (MUI 2017, hlm.2-8). Hal demikian menunjukkan bahwa MUI berupaya untuk memberikan rambu-rambu (kode etik) atas pelbagai bentuk aktifitas dakwah yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia.

Pada sub bab inti pembahasan penelitian ini, akan diuraikan analisis tentang dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi dakwah yang termaktub pada pedoman dakwah yang dirumuskan oleh MUI. Uraian penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

### **Nilai Sila Pertama dan Kedua dalam Orientasi Mewujudkan Kehidupan Umat Islam Yang Menjunjung Nilai-nilai Transendental dan Kemanusiaan**

Tidak dapat dibantah bahwa pelbagai bentuk radikalisme atas nama agama Islam merupakan aktivitas menyimpang yang landasan motifnya tidak dapat dibenarkan. Salah satu motif radikalisme maupun terorisme seringkali dikaitkan dengan motif dan orientasi yang bersifat keagamaan. Hal demikian sebagaimana yang seringkali diberitakan oleh media. Sebagai contoh misalnya dalam konteks radikalisme Islam, istilah *jihad* seringkali menjadi motif pelakunya. Pernyataan demikian meskipun tidak sepenuhnya benar, akan tetapi secara teoritik jika dilihat dalam psikologi agama (Donny Khoirul Azis, 2021, hlm. 230). Hal demikian disebabkan dalam konteks psikologi agama sendiri dijelaskan terdapat dua jenis orientasi keagamaan. Pertama, orientasi keagamaan intrinsik yang menjadikan agama sebagai tujuan tindakan karena agama itu sendiri. Kedua, orientasi ekstrinsik keagamaan yang menjadikan agama sebagai alat untuk memperoleh tujuan subjektif. (Sekar Ayu Aryani, 2020, hlm. 298). Dengan kata lain, radikalisme atas nama Islam sejatinya dapat memiliki motif yang beragam, tidak mesti atas dasar intrinsik dari ajaran agama itu sendiri. Merespons hal demikian dibutuhkan usaha intensif, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sipil melalui pelbagai bentuk media atau program, terlebih melalui penanaman nilai-nilai ajaran Islam yang humanis. Pada konteks inilah, aktifitas dakwah Islam memiliki peran strategis

dalam pembentukan karakter keberagamaan Islam yang moderat, jauh dari dakwah yang mengarah pada pembentukan pola pikir dan sikap keberagamaan Islam yang radikal.

Pada pedoman dakwah MUI ditegaskan bahwa orientasi dakwah, antara lain bertujuan untuk membentuk sikap dan kepribadian umat Islam Indonesia yang memiliki komitmen kuat pada nilai ajaran akidah, syariat dan akhlak Islam dalam ajaran *ahlussunnah wal jamaa* (MUI, 2017, hlm.8). Penekanan MUI terhadap nilai-nilai ajaran *ahlussunnah wal jamaah* dalam orientasi dakwah di Indonesia merupakan hal kontekstual. Mengingat *ahlussunnah wal jamaah* sebagai komunitas penganut ajaran Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga disepakati oleh para ulama merupakan paham mayoritas umat Islam Indonesia. Penting diketahui paham *ahlussunnah wal jamaah* tersebut memiliki karakter paradigma dan sikap keberagamaan Islam yang moderat (*washatiyah*) baik dalam konsep keyakinan (*aqidah*), syari'ah (hukum) maupun praktik akhlak (tasawuf) yang paralel dengan corak sosial kebudayaan masyarakat Indonesia (Ahmad Syafi'I Mufid, 2013, hlm. 8).

Tidak berhenti pada orientasi kehidupan transendenta sebagaimana di atas, dalam pedoman dakwah yang dirumuskan MUI juga ditekankan bahwa orientasi dakwah di Indonesia juga harus menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang dapat menjadikan kepribadian umat Islam memiliki ketangguhan dalam menghadapi rongrongan akidah, paham, dan pemikiran yang keliru, termasuk upaya pemurtadan. (MUI, 2017, hlm.8). Dalam hal ini, keberadaan MUI juga merupakan instansi keagamaan yang memiliki legalitas formal sekaligus otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait sosial keagamaan yang terjadi di Indonesia (Alfitri Alfitri, 2020, hlm. 367). Tidak terkecuali terkait identifikasi suatu ajaran atau aliran apakah dinyatakan menyimpang dari ajaran Islam atau tidak (Faizah & Muhammad Thohiri, 2018, hlm. 14).

Orientasi dakwah berupa perwujudan kehidupan umat Islam yang menjunjung nilai-nilai transendental dan kemanusiaan sebagaimana penjelasan di atas menunjukkan bahwa MUI ingin menamakan nilai-nilai ke-Islaman (transcendental) dan kemanusiaan dalam pelbagai aktifitas dakwah Islam di Indonesia. Pentingnya keberadaan nilai transendental dan kemanusiaan paralel dengan nilai yang termuat dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Mengingat dalam ranah aksiologisnya, nilai-nilai antroposentris dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai teosentris yang juga menjadi misi besar dalam rumusan Pancasila (Nur Mutmainnah, 2010, hlm. 31). Pernyataan demikian tidaklah berlebihan, mengingat

dalam membina kehidupan yang harmonis antar individu dalam kehidupan sosial yang majemuk membutuhkan kesadaran sikap untuk menjunjung tingginya nilai-nilai transendental dan kemanusiaan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pentingnya manifestasi nilai-nilai transendental dan kemanusiaan dalam orientasi dakwah yang dirumuskan MUI sejalan dengan misi nilai yang termuat dalam sila pertama dan kedua Pancasila.

### **Nilai Sila Ketiga dalam Orientasi Mewujudkan Kehidupan Umat Islam Yang Cinta Tanah Air dan Toleran**

Penguatan karakter dan jati diri masyarakat Indonesia di tengah arus era globalisasi dewasa ini menjadi suatu hal urgen yang membutuhkan penanganan serius baik dari masyarakat sipil maupun pemerintah (Singgih Tri Sulistiyono, 2018, hlm. 1). Mengingat hilangnya karakter jati diri bangsa dapat menghilangkan jiwa persatuan dan sikap cinta tanah air yang pada akhirnya dapat berdampak pada ragam konflik sosial antar sesama anak bangsa (M. Mona Adha & Erwin S, 2020, hlm.24-25). Pada konteks inilah, penting strategi penanaman nilai-nilai nasionalis dan pluralis bagi masyarakat Indonesia dalam menyikapi pelbagai dampak dari era globalisasi yang ada.

Pada pedoman dakwah MUI ditegaskan bahwa orientasi dakwah antara lain untuk membentuk sikap dan kepribadian umat Islam yang memiliki komitmen kuat terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan menghargai kebinekaan dalam bingkai kehidupan di Indonesia (MUI, 2017, hlm.8). Orientasi tersebut merupakan hal yang penting dan niscaya terlebih eksistensi Pancasila dalam konteks Indonesia menjadi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pentingnya orientasi dakwah berupa penanaman nilai komitmen dan cinta tanah air (nasionalisme) semakin kuat dan niscaya dibutuhkan jika melihat fakta empiris di Indonesia, bahwa tidak sedikit ragam ideologi Islam transnasional sudah menyebar ke berbagai daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal demikian tidaklah mengherankan, karena era globalisasi saat ini telah membuka jalan lebar bagi sekelompok umat Islam transnasional untuk menyebarkan nilai atau paham yang dianutnya ke pelbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai contoh ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) misalnya, sebagai sebuah gerakan transnasional Islam yang memiliki pola pikir dan gerakan radikal, bahkan

terorisme atas nama Islam (Ajeng Rizqi R, 2020, hlm. 723-725). Tidak hanya ISIS yang melakukan propagandanya melalui jalur kekerasan atas nama Islam, keberadaan gerakan ideologi Islam transnasional yang melalui jalur soft atau persuasif, seperti halnya Hizbut Tahrir Indonesia juga jika dilihat Dalam studi gerakan sosial, countermovement atau gerakan tandingan muncul ketika sebuah gerakan tertentu dianggap membawa ancaman terhadap keamanan politik dan sosial. Sebuah gerakan sosial berusaha untuk mengubah situasi yang ada sementara gerakan tandingan akan berusaha untuk mempertahankannya. Akibatnya, konflik antara keduanya menjadi tak terelakkan di mana keduanya akan bersaing untuk memenangkan satu sama lain (Hasbi Aswar, Danial Bin Mohd Yusof, and Rohana Binti Abdul Hamid, 2020, hlm. 183–84). Model gerakan dan paham Islam transnasional tersebut dalam ranah praksisnya dapat merusak semangat integritas, persatuan, dan keutuhan bangsa Indonesia. Pada konteks inilah, pentingnya para pendakwah di Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dalam mater dakwah yang disampaikannya

Kemudian berkaitan dengan orientasi dakwah yang dirumuskan MUI berupa pembentukan sikap dan kepribadian umat Islam yang memiliki sikap toleransi dalam menghargai kebinekaan hidup juga merupakan hal yang tidak boleh terabaikan dalam setiap aktifitas dakwah di Indonesia. Terlebih pada realitas sosialnya di Indonesia juga tidak sedikit terdapat Organisasi Masyarakat Islam yang memiliki pola pikir dan sikap keberagamaan sosial eksklusif dan otoriter dalam mengekspresikan penafsirannya atas ajaran Islam. Pola keberagamaan Islam yang demikian dapat berimplikasi pada paradigma penyeragaman, sehingga umat Islam yang berbeda dengan mereka akan dianggap salah bahkan tersesat. Hal inilah yang pada akhirnya seringkali memicu kegaduhan dan bahkan konflik sosial di kalangan internal umat umat Islam di Indonesia (Eko Sumadi, 2016, hlm. 167). Terlebih di era media digital saat ini, otoritas keagamaan melalui pelbagai aktifitas dakwah di ruang media sosial semakin plural. Melalui ruang media digital, kontestasi otoritas keagamaan, baik dari kelompok umat Islam tradisional, reformis, radikal, dan pendatang baru berkompetisi untuk mencapai pengakuan publik (Zulkifli, 2013, hlm. 180). Dalam merespons fenomena eksklusifisme pola pikir dan keberagamaan sosial umat Islam tersebut dibutuhkan penanaman nilai-nilai ajaran Islam melalui materi-materi dakwah yang membentuk pola pikir dan sikap

keberagaman sosial yang toleran, yakni menghormati dan menghargai ragam perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam.

Jika dilihat dalam tinjauan nilai Pancasila, maka orientasi dakwa yang dirumuskan oleh MUI berupa perwujudan kehidupan umat Islam yang cinta tanah air dan toleran paralel dengan misi sosial dalam nilai sila ketiga Pancasila. Hal demikian dikarenakan pada sila ketiga tersebut memuat nilai akan pentingnya ikatan persatuan dan kesatuan ditengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk (Muhammad Mona Adha & Erwin Susanto, 2020, hlm. 136). Terlebih di era globalisasi dewasa ini di mana arus paham dari luar (internasional) berpotensi besar masuk ke Indonesia, baik itu paham yang positif maupun paham yang justru kontra-produktif dengan semangat nilai-nilai kebangsaan atau ideologi negara Indonesia. Pada contoh konteks tersebutlah, pentingnya kesadaran dan sikap komitmen kebangsaan dalam mewujudkan nilai-nilai kesatuan dan persatuan dalam bingkai kehidupan bernegara di Indonesia.

### **Nilai Pendidikan Sila Keempat dan Kelima dalam Orientasi Mewujudkan Kehidupan Umat Islam Yang Inovatif dan Harmonis**

Perkembangan teknologi semakin memberikan ruang informasi bagi masyarakat Indonesia untuk lebih mudah mengenal, memahami paradigma dan kebudayaan bangsa lain (Daryanto Setiawan, 2018, hlm. 62). Namun pada ranah praksisnya, fenomena tersebut tidak sedikit berimplikasi pada hal negatif, seperti halnya mengikuti pola pikir dan budaya asing secara berlebihan, bahkan mengabaikan budaya sendiri. Pola pikir dan sikap demikian pada akhirnya justru dapat membuat rasa cinta atau kebanggaan pada kearifan budaya bangsa sendiri menjadi hilang. Dalam merespons potensi problem tersebut sejatinya keberadaan nilai-nilai Pancasila sebagai idelogi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki seperangkat yang dapat digunakan untuk menanggulangnya (Mulyono, 2017, hlm. 106). Namun sebagai bangsa religious (Faisal Ismail, 2018, hlm.19). penting juga upaya penanaman nilai yang bersumber dari ajaran agama, terlebih ajaran Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia (Aryanta Nugraha, 2012, hlm.12). Pada konteks inilah pentingnya penanaman nilai ajaran Islam kepada masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dalam pembentukan karakter individu yang menjaga kearifan lokal budaya bangsanya dengan baik.

Pada pedoman dakwah MUI ditegaskan bahwa orientasi dakwah, antara lain untuk membentuk sikap dan kepribadian umat Islam Indonesia yang dapat menjadi pelopor, pemakmur, dan penebar kedamaian serta kasih sayang (*rahmat*) bagi kehidupan alam semesta (MUI, 2017, hlm. 8). Orientasi dakwah tersebut menunjukkan penting terbentuknya kehidupan umat Islam yang inovatif dan harmonis dalam mewujudkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk

Pentingnya orientasi dakwah sebagaimana di atas paralel dengan spirit para ulama (pendakwah) zaman dahulu yang menyebarkan dakwah Islam di Nusantara. Peran walisongo misalnya, dakwah mereka dapat bersinergis dengan kondisi realitas sosial budaya masyarakat Nusantara (Indonesia). Hal demikian disebabkan mereka menyadari bahwa eksistensi ajaran Islam bagi masyarakat Jawa telah didahului oleh pelbagai kearifan budaya lokal. Keterbukaan dakwah Islam yang dibawa mereka mencerminkan formulasi harmonis dakwah Islam di tengah ragam kearifan lokal yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat Nusantara (Mas'udi, 2015, hlm. 279-280). Atas dasar inilah, pentingnya orientasi aktifitas dakwah berupa penanaman nilai-nilai ajaran Islam yang akomodatif terhadap budaya lokal. Oleh karena itu, pelbagai aktifitas dakwah di Indonesia diharapkan dapat membentuk karakter keberagamaan Islam yang moderat dalam merespons ragam kearifan lokal di Indonesia. Hal demikian karena aktifitas dakwah Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang sinergis dan harmonis dengan upaya pelestarian dan pengembangan kearifan lokal ke arah lebih baik.

Pentingnya orientasi dakwah berupa pembentukan kehidupan umat Islam yang inovatif dan harmonis dalam kehidupan sosial sejalan dengan nilai Pancasila, yakni sila keempat dan kelima. Dalam perspektif nilai sila keempat misalnya, penting kesadaran masyarakat Indonesia untuk dapat senantiasa bersikap demokrasi, dan terbuka dalam menyikapi persoalan bersama dalam mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan sosial yang majemuk. Begitu juga, dimensi nilai sila kelima berupa pentingnya mewujudkan sikap bijak dan proporsional dalam menjadikan nilai keadilan sosial sebagai basis paradigmatis serta sikap

dalam mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki latarbelakang beragam.

Upaya mewujudkan kehidupan umat Islam yang inovatif dan harmonis dalam kehidupan sosial berkaitan erat dengan pentingnya objektifikasi nilai-nilai sosial profetik Islam dalam konteks kehidupan universal. Dalam hal ini, Kuntowijoyo menawarkan gagasan yang disebut dengan istilah Ilmu Sosial Profetik (ISP). Melalui gagasan tersebut ingin menunjukkan pentingnya landasan paradigmatik dalam ilmu sosial agar memiliki pijakan pada dasar ajaran Islam. Oleh sebab itu, gagasan ISP berupaya untuk mentransformasikan nilai-nilai sosial yang bersumber dari ajaran Islam agar dapat membumi. Maksudnya dapat dimanifestasikan dalam konteks kehidupan sosial yang majemuk, yakni kemaslahatan dari nilai-nilai sosial Islam tersebut dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia, tidak hanya bagi yang beragama Islam semata, sehingga tidak mempersoalkan basis epistemologisnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam gagasan ISP memiliki tiga nilai yang menjadi instrumen. Pertama, nilai humanisasi yang berpijak dari ajaran Islam berupa *amar makruf*. Kedua, nilai liberasi yang berpijak dari ajaran Islam berupa nahi munkar. Ketiga, nilai transendensi yang berpijak pada ajaran Islam berupa keimanan (iman). Tiga nilai gagasan ISP tersebut memiliki landasan teologi-normatif dari pesan Qur'an Surat Ali-Imran ayat 110. Oleh karena itu, ketiga nilai tersebut, baik humanisasi, liberasi, dan transendensi tidak didikotomikan, melainkan saling sinergis dalam membumikan nilai-nilai sosial Islam dalam kehidupan universal (Athoillah Islamy, 2020, hlm.163-164).Ketiga nilai tersebut seyogyanya dapat menjadi landasan paradigmatik dalam mewujudkan orientasi dakwah berupa perwujudan kehidupan umat Islam yang inovatif dan harmonis. Setidaknya nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi dapat tercover dalam setiap materi dakwah yang disampaikan oleh para pendakwah di Indonesia.

Dengan ditemukannya dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi dakwah yang termaktub dalam pedoman dakwah yang dirumuskan MUI menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa sejatinya orientasi ajaran dakwah Islam memiliki titik temu dengan pelbagai nilai universal yang dapat menjadi pedoman hidup dalam kehidupan masyarakat yang heterogen, dalam arti tidak sebatas eksklusif untuk kemaslahatan hidup umat Islam semata.. Dengan kata lain, nilai-nilai sosial profetik Islam yang termuat dalam orientasi dakwah Islam dapat dimanifestasikan dalam kehidupan sosial masyarakat yang majemuk.

## Kesimpulan

Berpijak pada uraian pembahasan inti penelitian ini dapat disimpulkan terdapat dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi dakwah pada pedoman dakwah yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kesimpulan besar demikian dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut. Pertama, nilai sila pertama dan kedua dalam orientasi mewujudkan kehidupan umat Islam yang menjunjung nilai-nilai transendental dan kemanusiaan. Orientasi tersebut dapat diwujudkan dengan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan kemanusiaan dalam materi dakwah. Kedua, nilai sila ketiga dalam orientasi mewujudkan kehidupan umat Islam yang cinta tanah air dan toleran. Orientasi tersebut dapat diwujudkan dengan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi semangat nasionalisme (*hubbul waton*) dan menghargai keberagaman hidup sebagai hukum alam (*sunnatullah*). Ketiga, nilai sila keempat dan kelima dalam orientasi mewujudkan kehidupan umat Islam yang inovatif dan harmonis. Orientasi tersebut dapat diwujudkan dengan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi semangat humanisasi (*amar-makruf*) dan liberasi (*nahi-munkar*) dalam kehidupan sosial masyarakat yang majemuk.

Berdasarkan pada temuan di atas, maka implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan terdapat sejatinya orientasi ajaran dakwah Islam memiliki titik temu dengan pelbagai nilai universal yang dapat menjadi pedoman hidup dalam kehidupan masyarakat yang heterogen, dalam arti tidak sebatas eksklusif untuk kemaslahatan hidup umat Islam, melainkan seluruh umat dengan latar belakang agama yang beragam.

## Rekomendasi Penelitian

Terdapat celah penelitian dari pembahasan pokok penelitian ini yang dapat dilanjutkan oleh peneliti berikutnya, yakni terkait bagaimana pola atau strategi politik (pemerintah) dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila materi dakwah yang disampaikan oleh para pendakwah di Indonesia, baik di dunia nyata maupun maya.

## Daftar Pustaka

- Akmaliah, Wahyudi. (2020). The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10 (1).
- Adha, Muhammad Mona, & Erwin Susanto. (2020). Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15 (1).
- Alfitri. (2020). Bureaucratizing Fatwā in Indonesia: The Council of Indonesian Ulama and Its Quasi-Legislative Power. *Ulumuna* 24 (2): 367–97.
- Arifuddin. (2020). Dakwah through Internet: Challenges and Opportunities for Islamic Preachers in Indonesia. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 3 (1): 161–88.
- Aryani, Sekar Ayu. (2020). Orientation of Religiosity and Radicalism: The Dynamic of an Ex-Terrorist's Religiosity. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10 (2): 297–321.
- Aswar, Hasbi, Danial Bin Mohd Yusof, and Rohana Binti Abdul Hamid. (2020). Conflict Between Hizb Ut-Tahrir And Islamic Civil Society In Indonesia: A Countermovement Approach. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5 (2): 183–203.
- Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, Athoillah Islamy. (2021). Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7 (2): 229–44.
- Dewantara, Jagad Aditya, Ilham Fajar Suhendar, Rum Rosyid, and Thomy Sastra Atmaja. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies* 1 (5): 400–405.
- Faizah, Muhammad Thohri. (2018). Strategi Penanganan Paham Keagamaan Menyimpang Dalam Perspektif Dakwah (Studi Pada Kasus-Kasus Yang Ditangani MUI NTB). *Jurnal Penelitian Keislaman* 14 (1): 14–30.
- Faroqi, Adam, & Nanang Ismail. (2013). “Portal Mui Online: Optimalisasi Dakwah Islam Melalui Internet (Studi Kasus MUI Kecamatan Ujungberung).” *JURNAL ISTEK* 7 (1).
- Gesmi, Irwan, and Yun Hendri. (2018). “Pendidikan Pancasila.” *Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Gunawan, Akmal Rizki. (2021). Relasi Otoritas Dan Tradisi Dalam Pewacanaan Pancasila Pada Tafsir Al-Azhar. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5 (1): 183–202.
- Hilabi, Abd. (2020). Dakwah Majelis Ulama Indonesia Dan Perubahan Iklim. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam* 1 (1): 45–54. .
- Hsb, Akmal Rizki Gunawan, & Siti Asiah. (2018). Membangun Karakter Kebangsaan Melalui Pendidikan Multi Kultural Berbasis Al-Qur'an. *Attadib: Journal of Elementary Education* 2 (2): 90–104.

- Islamy, Athoillah. (2020). Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5 (2): 155–79.
- Islamy, Athoillah. (2021) Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6 (1): 51–73.
- Islamy, Athoillah. (2021). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kode Etik Netizen Muhammadiyah. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 197–210.
- Islamy, Athoillah (2021). *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid*. Disertasi, Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Ismail, Faisal. (2018). Religion, State, And Ideology In Indonesia:: A Historical Account Of The Acceptance Of Pancasila As The Basis Of Indonesian State. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 1 (2): 19–58.
- Jannah, Aulia Nur, & Dinie Anggraeni Dewi. 2021. “Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Di Masyarakat Abad Ke-21.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 (1): 931–36.
- Kaderi, M. Alwi. (2015). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Aswaja Presindo.
- Kisworo, Budi. (2017). “The Implementation of Islam as Rahmah Li Al-'alamin in Indonesia: Contributions, Challenges and Opportunities.” *AJIS* 2 (2).
- Mas'udi. (2015). “Dakwah Nusantara (Kerangka Harmonis Dakwah Walisongo Dalam Diseminasi Ajaran Islam Di Nusantara).” *AT-TABSYIR STAIN Kudus* 3 (2).
- Mastori, & Athoillah Islamy. (2021). “Menggagas Etika Dakwah Di Ruang Media Sosial.” *Komunikasia: Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 1 (1): 1–18.
- Miliano, Nurva, and Dinie Anggraeni Dewi. (2021). “Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia.” *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 1 (4).
- Mufid, Ahmad Syafi'I. (2013). “Paham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Dan Tantangan Kontemporer Dalam Pemikiran Dan Gerakan Islam Di Indonesia.” *Harmoni* 12 (3): 8–18.
- MUI, Komisi Dakwah. (2017). *Buku Panduan Teknis Penyusunan Peta Dakwah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia.
- Mulyono. 2017. “The Problems of Modernity and Identity in Globalization Era.” *Journal of Maritime Studies and National Integration* 1 (2): 106–11.
- Nugraha, Aryanta. (2012). “Moderate Islam as New Identity in Indonesian Foreign Policy: Between Global Role Aspiration and Co-Religious Solidarity.” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 1 (1).
- Rahmanillah, Ajeng Rizqi. (2020). “Transnational Islam In Southeast Asia: Tantangan Eksistensi Gerakan Islamic States In Iraq And Suriah (ISIS) Terhadap Demokratisasi

- Dan Human Security Di Kawasan Asia Tenggara.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5 (9): 723–38.
- Ridwan, M. K. (2017). “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi.” *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15 (2): 199–220.
- Rustandi, L. Rudy. (2020). “Disrupsi Nilai Keagamaan Dalam Dakwah Virtual Di Media Sosial Sebagai Komodifikasi Agama Di Era Digital.” *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3 (1): 23–34.
- Shan-A-Alahi, Ahmed, and Muhammad Nazmul Huda. (2016). “Role of Information Technology on Preaching Islam (Da’wah).” *American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences* 17 (1).
- Sudjito, Hendro Muhaimin, and Agung Saras Sri Widodo. (2018). “Pancasila and Radicalism: Pancasila Enculturation Strategies as Radical Movement Preventions.” *Jurnal Dinamika Hukum* 18 (1): 69–77.
- Sulistiyono, Singgih Tri. (2018). “The Importance of Indonesia’s Nationalism Revitalization in the Globalization Era: A Historical Perspective.” *Journal of Maritime Studies and National Integration* 2 (1): 1–15.
- Syamsudin. (2019). “Pentingnya Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam* 12 (2): 68–85.
- Thaib, Erwin Jusuf. (2019). “Problems of Da’wah in Social Media in Gorontalo City Communities.” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 13 (1): 37–53.
- Wandani, Amalia Rizki, and Dinie Anggraeni Dewi. (2021). “Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat.” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1 (2): 34–39.
- Wahyuningrum, Asri, Anasom, Thohir Yuli Kusmanto. (2018). “Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI Jawa Tengah,” *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2):186.
- Zulkifli. (2013). *The Ulama in Indonesia: Between Religious Authority and Symbolic Power. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 37 (1).